

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Madya Malang sudah memenuhi prinsip efisien, karena sesuai dengan standar yaitu 5,02 LHP konversi dalam 1 tahun, hal ini diatur dalam Surat Edaran No SE-09/PJ/2015, dimana rata-rata efisiensi dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 8,4, rata-rata rasio penyelesaian pemeriksaan pajak adalah 167% dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. Pelaksanaan pemungutan di KPP Madya yang diukur dengan *tax coverage ratio* sudah dapat dikatakan tinggi meskipun masih belum mencapai 100% karena realisasinya belum dicapai seluruhnya sesuai dengan potensi penerimaan pajak dan laju pertumbuhan penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun kenaikan *tax coverage ratio* tidak serta merta diikuti dengan kenaikan laju pertumbuhan, seperti yang terjadi pada tahun 2014 *tax coverage ratio* mengalami penurunan namun laju pertumbuhan penerimaan pajak mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan perhitungan *tax coverage ratio* didasarkan oleh perbandingan jumlah potensi dan realisasi penerimaan pajak, sedangkan laju pertumbuhan

didasarkan perubahan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penghambat efisiensi pelaksanaan pemeriksaan pajak disebabkan karena (a) data eksternal yang tersedia masih kurang khususnya data yang berasal dari pihak luar yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak; (b) tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dimana wajib pajak belum menyetor dan melaporkan pajak yang terutang; (c) pemanfaatan waktu yang kurang optimal dikarenakan adanya kegiatan lain yang harus diikuti oleh pemeriksa; (d) sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam melakukan pemeriksaan.

Selain adanya penghambat pelaksanaan efisiensi pemeriksaan pajak, peningkatan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan disebabkan karena (a) kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam mengumpulkan data-data wajib pajak sebagai data pendukung dan penguji dalam pelaksanaan pemeriksaan; (b) Adanya kesadaran yang tinggi dan etika baik dari wajib pajak yang ditunjukkan melalui penyampaian SPT yang tepat waktu dan memenuhi kewajiban perpajakannya; (c) Pemanfaatan Teknologi yaitu SIDjP; (d) Adanya peningkatan kemampuan pemeriksa pajak melalui kegiatan *In-House Training* (IHT), *workshop*, diklat, *e-learning* dan *On-The Job Training*; (e) Adanya penambahan jumlah tenaga kerja pemeriksa berdasarkan penilaian akhir tahun yang dilaksanakan KPP dengan didasarkan jumlah beban kerja pemeriksa.

4. Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang penghambat dalam meningkatkan *tax coverage ratio* disebabkan karena (a) Masih adanya

wajib pajak yang belum patuh yaitu dengan melakukan perlawanan aktif dan pasif; (b) masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum terjangkau karena sikap wajib pajak yang tidak terbuka; (c) Tidak seimbangnya sumber daya manusia dan volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawab fiskus, menguras tenaga fiskus dalam merealisasikan target penerimaan pajak; (d) Ketersediaan data yang terbatas membuat fiskus kesulitan dalam menentukan potensi penerimaan pajak; (e) Kebijakan yang saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu peningkatan *tax coverage ratio* disebabkan karena (a) dukungan dari atasan dengan memberi perhatian dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan fiskus; (b) Penegakan kebijakan yang konsisten, jelas dan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lain, tidak akan membuat wajib pajak mengalami kebingungan; (c) Kerjasama dari wajib pajak berupa kesadaran wajib pajak untuk patuh dan tepat waktu menjalankan kewajibannya; (d) kondisi ekonomi yang baik akan meningkatkan penerimaan pajak; (e) tersedianya data yang valid akan mempermudah fiskus dalam menentukan target penerimaan pajak dan menjadi dasar dilakukan pemeriksaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan dan meningkatkan *tax coverage ratio* untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah lainnya agar data-data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. Perolehan data yang akurat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan target penerimaan pajak dan bukti yang kuat dalam pemeriksaan bila ada wajib pajak yang tidak patuh.
2. Melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti misalnya kendaraan agar bila ada pemeriksaan yang mendesak tidak terhambat dengan kegiatan lainnya atau dengan lebih memprioritaskan pemeriksaan yang mendesak.
3. Melakukan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan otoritas perpajakan untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dalam menjangkau masyarakat yang potensial yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak
4. Melakukan perhitungan, penguatan, dan perluasan basis data atas potensi penerimaan pajak yang belum terjangkau di lingkungan kerja KPP Madya Malang.
5. Selain adanya penegakan hukum dari pemerintah atas ketidakpatuhan wajib pajak, wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadarannya sendiri untuk mematuhi peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bila kedua hal ini berjalan sinergis dan dengan melakukan ekstensifikasi pajak dapat menghasilkan wajib pajak baru diharapkan penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan.